



RUNTUHNYA SYURA, LAHIRNYA DINASTI: PERGESERAN POLITIK ISLAM DARI KHALIFAH MENUJU MONARKI HEREDITER UMAYYAH

Suci Rahmadani¹, Miftahul Uliya², Arifatul Husna³

¹⁻³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.

Email: miftauliya2@gmail.com, miftauliya2@gmail.com,
arifatulhusnaa9@gmail.com

ABSTRACT

The transformation of the Islamic governance system from the shura caliphate to hereditary monarchy during the Umayyad Dynasty represents one of the most significant shifts in classical Islamic political history. This change emerged following the end of the Rightly Guided Caliphs era and the establishment of the Umayyad Dynasty under Muawiyah ibn Abi Sufyan in 661 AD. The governance system, previously grounded in consultation (shura), oath of allegiance (bay'ah), and communal legitimacy, transitioned into a dynastic monarchy centered on hereditary family lineage. This study aims to analyze the factors underlying this transformation and its implications for the development of Islamic politics. A qualitative approach based on library research was employed, drawing from books, journals, articles, and historical documents related to Islamic studies and the formation of the Umayyad Dynasty. The study concludes that this transformation was driven by political instability following the Fitnah Kubra, Muawiyah's exceptional political acumen in establishing a centralized government in Damascus, and the vast expansion of Islamic territories. These factors positively contributed to administrative stability, increased bureaucratic efficiency, and territorial growth. However, the shift also drew significant criticism for allegedly abandoning egalitarian and deliberative values in Islam. Furthermore, the hereditary system raised serious questions regarding political legitimacy, generating tensions that shaped Islamic political dynamics in subsequent centuries. The Umayyad era thus marks the foundational turning point in Islamic political thought, from the consultative caliphate model toward dynastic hereditary rule.

Keyword: Umayyad Dynasty, shura caliphate, hereditary monarchy, Muawiyah ibn Abu Sufyan, Islamic politics.

ABSTRAK

Transformasi sistem pemerintahan Islam dari khalifah syura ke monarki turun-temurun pada zaman Dinasti Umayyah adalah salah satu dari perubahan yang paling berarti dalam Transformasi sistem pemerintahan Islam. Perubahan ini terjadi seiring berakhirnya era Khulafaur Rasyidin dan berdirinya Dinasti Umayyah di bawah kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 661 M. Sistem pemerintahan yang sebelumnya berlandaskan musyawarah, baiat, dan legitimasi umat bergeser menjadi sistem monarki dinasti yang berpusat pada garis keturunan keluarga berkuasa. Penelitian ini bertujuan menganalisis berbagai faktor yang melatarbelakangi perubahan tersebut serta implikasinya bagi perkembangan politik Islam. Metode yang digunakan adalah kualitatif berbasis studi kepustakaan, dengan sumber data berupa buku, jurnal, artikel, dan dokumen sejarah yang berkaitan dengan ilmu-ilmu Islam dan pembentukan Dinasti Umayyah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi tersebut dipengaruhi oleh ketidakstabilan politik pascaFitnah Kubra, kemampuan politik Muawiyah dalam membangun pemerintahan terpusat di Damaskus, serta luasnya wilayah kekuasaan Islam. Dampak positifnya meliputi terciptanya stabilitas administratif, peningkatan efisiensi birokrasi, dan perluasan wilayah Islam. Namun, perubahan ini juga menuai kritik karena dianggap menghilangkan nilai musyawarah dan egalitarianisme dalam Islam. Selain itu, sistem monarki hereditas memunculkan perdebatan seputar legitimasi politik yang mewarnai dinamika politik Islam pada masa-masa berikutnya. Dengan demikian, era Umayyah menjadi titik balik fundamental dalam konsep kekuasaan politik Islam, dari sistem khilafah syura menuju kerajaan dinasti yang diwariskan secara turun-temurun.

Kata Kunci: Dinasti Umayyah, khalifah syura, monarki hereditas, Muawiyah bin Abu Sufyan, politik Islam.

PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan Islam di awal sejarahnya dibangun dengan dasar musyawarah. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, kepemimpinan umat Islam dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin. Mereka dipilih berdasarkan kesepakatan antara para sahabat dan pemimpin masyarakat Muslim. Sistem ini menunjukkan bahwa umat ikut serta dalam memilih pemimpin dan memberikan dukungan politik melalui baiat. Pada masa Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, pemerintahan Islam mempertahankan cara kepemimpinan yang sederhana, kolektif, dan selaras dengan prinsip musyawarah dalam Islam.¹

Akan tetapi, keadaan politik di kalangan umat Islam mulai berubah besar setelah terjadinya konflik yang dikenal dengan nama Fitnah Kubra. Konflik ini

¹ Sistem Pemerintahan, Pada Masa, and Khulafaur Rasyidin, "Transformasi Manageria Transformasi Manageria" 4, no. 1 (2024): 30–41, <https://doi.org/10.47476/manageria.v4i1.3708>.

dimulai setelah Khalifah Utsman bin Affan dibunuh dan diikuti oleh pertikaian politik antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan.² Perang Jamal dan Perang Shiffin menunjukkan bahwa saat itu dunia Islam menghadapi masalah politik serius dan perpecahan di dalamnya.³ Situasi ini semakin parah setelah Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh kelompok Khawarij pada tahun 661 M.²

Setelah Ali bin Abi Thalib meninggal, putranya, Hasan bin Ali, mengambil alih kepemimpinan. Namun, dukungan politik untuk Hasan tidak cukup kuat, sehingga posisi Muawiyah semakin kokoh. Untuk menjaga agar umat Islam tetap bersatu dan menghindari konflik yang berkepanjangan, Hasan memutuskan untuk menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah melalui sebuah kesepakatan damai. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai 'Am al-Jama'ah atau tahun persatuan umat Islam, dan menandai awal berdirinya Dinasti Umayyah di Damaskus.⁴

Berdirinya Dinasti Umayyah menunjukkan perubahan besar dalam cara pemerintahan dalam Islam. Sebelumnya, khalifah dipilih lewat diskusi bersama. Namun, di masa Muawiyah, sistemnya jadi kerajaan yang diwariskan dari ayah ke anak. Muawiyah memilih putranya, Yazid bin Muawiyah, untuk menggantikan posisinya. Kebijakan ini jadi awal pergeseran dari sistem syura ke sistem dinasti dalam politik Islam. Tindakan ini diambil untuk menjaga agar politik tetap stabil dan untuk mencegah konflik perebutan kekuasaan yang bisa memecah umat Islam.⁵

Transformasi dalam cara pemerintahan ini memberikan pengaruh yang sangat besar dalam sejarah umat Islam. Di satu sisi, Dinasti Umayyah sukses membangun pemerintahan yang lebih teratur, memperkuat sistem kerja pemerintahan, menyusun kekuatan militer, dan memperluas wilayah kekuasaan Islam sampai ke Afrika Utara, Andalusia, dan Asia Tengah. Damaskus, sebagai pusat pemerintahan, tumbuh menjadi lokasi yang penting untuk politik dan administrasi. Sistem pemerintahannya juga mulai meniru model dari Bizantium dan Persia, sehingga cara mengelola negara menjadi lebih terfokus dan efisien.⁶

² Fitri Rahayu and Abi Thalib, "Transformasi Politik Pasca Khalifahan : Studi Atas Peran Muawiyah Ibn Abi Sofyan Dalam Pembentukan Dinasti Sejarah Awal Islam" 8, no. 1 (2025): 1-10, <https://doi.org/10.24014/au.v8i1>.

³ Rahmat Hidayat et al., "Peristiwa Fitnah Kubro : Sejarah Dakwah Yang Harus" 5, No. 1 (2025): 8-16.

⁴ Febri Rahmadhani, "Al-Fitnah Al-Kubra Roots Sectarianism In Islam" 22, no. 1 (2024): 77-85.

⁵ Lina Wati et al., "Dinasti Umayyah (661 - 750 M) : Peninggalan Sejarah Dan Pengaruhnya Dalam Perkembangan Islam" 2 (2025).

⁶ M Afiquil Adib, Universitas Islam Lamongan, Jawa Timur, "Memahami Pusat-Pusat Peradaban Islam Masa Memahami Pusat-Pusat Peradaban Islam Masa" 2, no. 2 (2024).

Berdasarkan informasi yang ada, penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pergeseran sistem pemerintahan Islam dari khalifah yang dipilih oleh musyawarah menjadi monarki yang diwariskan pada masa Umayyah. Diskusi akan fokus pada alasan-alasan yang menyebabkan perubahan sistem pemerintahan, cara-cara yang dilakukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dalam melakukan perubahan politik, serta pengaruhnya terhadap kemajuan politik dan kebudayaan Islam. Kajian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang dinamika politik Islam di masa lampau dan relevansinya bagi perkembangan sistem pemerintahan Islam di masa mendatang.

METHOD

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode studi pustaka (*library research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode studi pustaka tersebut merupakan metode pengumpulan sumber-sumber ilmiah yang membahas tentang Dinasti Umayyah dan perkembangan sistem pemerintahan. Rujukan data pada penelitian ini diperoleh dari beberapa referensi yang berisi transformasi sistem pemerintahan Islam dari khalifah syura menuju monarki hereditas pada era Umayyah. Metode pengumpulan datanya menggunakan pendekatan membaca, menulis, menelaah, dan menganalisis berbagai informasi yang beragam dengan topik penelitian. Metode deskriptif digunakan untuk memberikan ilustrasi sistematis tentang sejarah pembentukan Dinasti Umayyah, politik Muawiyah bin Abi Sufyan, dan juga dampaknya bagi masyarakat Muslim. kemudian, data dianalisis untuk mengidentifikasi korelasi antara situasi politik setelah kejadian Fitnah Kubra dengan terbentuknya sistem monarki hereditas dalam pemerintahan Islam. Metode ini juga akan diterapkan untuk menganalisis pengaruh perubahan sistem pemerintahan terkait berkembangnya politik dan peradaban Islam pada masa yang akan datang.

RESULTS AND DISCUSSION

Sistem pemerintahan Islam pada Masa Khulafaur Rasyidin

Sistem pemerintahan dalam Islam pada masa Khulafaur Rasyidin didirikan dengan menggunakan sistem syura atau musyawarah. Penunjukan khalifah dilaksanakan secara bersama-sama oleh para sahabat dan pemimpin-pemimpin masyarakat Muslim. Pemilihan Abu Bakar Ash-Shiddiq dilakukan secara syura di Saqifah Bani Sa'idah, sementara pemilihan Umar bin al-Khattab adalah oleh Abu Bakar dengan persetujuan kaumnya. Sedangkan untuk Utsman bin Affan, dia dipilih lewat jalan syura yang dibangun oleh Umar, dan Ali bin Abi Thalib dilantik atas basis janji setia yang terjadi setelah Utsman meninggal dunia. Dalam hal ini,

sistem tersebut mencerminkan bahwa pengakuan kekuasaan di awal era Islam tergantung pada dukungan umat dan kepemimpinan individu.

Pemerintahan Khulafaur Rasyidin adalah pemerintahan yang sangat sederhana dan sangat dekat dengan masyarakat. Prinsip-prinsip keadilan, kebersamaan, dan tanggung jawab sosial diimplementasikan dalam pemerintahan. Kemudian, pembahasan mengenai masalah-masalah penting lainnya juga sering dilakukan melalui musyawarah dengan para sahabat. Pada prinsipnya, sistem pemerintahan ini merupakan manifestasi dari nilai-nilai demokrasi. Struktur kepemimpinan semacam itu dilihat sebagai refleksi dari nilai-nilai demokrasi di dalam Islam karena memprioritaskan kepentingan masyarakat sebagai legitimasi politik.

Akan tetapi, seiring waktu Islam semakin meluas dan politik menjadi lebih rumit, sistem syura mulai menghadapi banyak masalah. Pertengkar internal yang muncul pada akhir pemerintahan Utsman bin Affan dan masa Ali bin Abi Thalib menjadi awal dari perpecahan politik di kalangan umat Islam. Masalah ini akhirnya mempengaruhi stabilitas pemerintahan dan membuka peluang bagi perubahan sistem politik Islam di masa depan.⁷

Munculnya Dinasti Umayyah

Setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan berhasil mengambil alih kekuasaan dan mendirikan Dinasti Umayyah pada tahun 661 M. Muawiyah dikenal sebagai pemimpin yang memiliki kemampuan politik dan administrasi yang kuat. Sebelum menjadi khalifah, ia telah lama menjadi gubernur Syam sehingga memiliki dukungan militer dan politik yang besar. Muawiyah memutuskan untuk memindahkan pusat pemerintahan Islam dari Madinah ke Damaskus. Keputusan ini menandakan bahwa Islam mulai bergeser dari fokus pada keagamaan menuju kekuasaan yang lebih terkait dengan pemerintahan dan militer.

Dengan demikian, peran Muawiyah membawa perubahan besar dalam sejarah Islam, karena sebelumnya Madinah dikenal sebagai pusat keagamaan yang sangat penting. Sekarang, Damaskus menjadi pusat kekuasaan administratif dan militer yang lebih penting bagi kekhalifahan Islam. Muawiyah memilih Damaskus karena letak geografisnya yang strategis dan kemampuan untuk mengontrol wilayah yang lebih luas. Ini menunjukkan bahwa Muawiyah ingin memperkuat kekuasaan dan pengaruh Islam di wilayah yang lebih luas.⁸

⁷ Fuad Masykur dan Otong Suhendar, "Sistem Pemerintahan dan Implementasi Hukum Islam pada Masa Khulafa' Ar-Rasyidin (11–40 H/632–660 M)," *Al-Fikrah* 5, no. 1 (2025): 59–72.

⁸ Mochammad Ardika and Akbar Bestari, "Dinamika Kekhalifahan Islam Bani Umayyah Di Masa Pemerintahan Muawiyah Bin Abi Sufyan (661-680 M): Pengaruh Politik , Sosial Dan Budaya" 1 (2024).

Pada masa pemerintahannya, Muawiyah membangun birokrasi yang lebih terorganisasi dan memperkuat militer untuk menjaga stabilitas negara. Ia juga menempatkan orang-orang yang loyal pada posisi penting dalam pemerintahan. Kebijakan ini membuat pemerintahan Umayyah menjadi lebih terpusat dibandingkan masa sebelumnya. bidang politik, Muawiyah dikenal sebagai pemimpin yang menggunakan pendekatan diplomasi dan strategi yang hati-hati. Ia berusaha menjaga persatuan wilayah Islam dengan mengurangi pemberontakan dan memperkuat hubungan dengan para pemimpin daerah. Muawiyah juga menerapkan sistem administrasi yang dipengaruhi oleh model pemerintahan Bizantium dan Persia, terutama dalam pengelolaan birokrasi dan keuangan negara. Pengaruh tersebut membuat pemerintahan Umayyah memiliki struktur yang lebih kompleks dibandingkan masa Khulafaur Rasyidin.

Selain keberhasilannya dalam membangun stabilitas politik, masa pemerintahan Muawiyah juga menandai perubahan besar dalam sistem kekhalifahan Islam. Jika pada masa sebelumnya khalifah dipilih melalui musyawarah atau syura, Muawiyah mulai menerapkan sistem monarki herediter dengan menunjuk putranya, Yazid bin Muawiyah, sebagai penerus kekuasaan. Jika sebelumnya pemilihan khalifah dilakukan dengan cara berdiskusi atau musyawarah, Muawiyah mulai menggunakan sistem kerajaan di mana ia menunjuk anaknya, Yazid bin Muawiyah, untuk menggantikan posisinya.⁹

Perubahan dalam sistem pemerintahan ini menjadi salah satu faktor penting dalam sejarah politik Islam. Dinasti Umayyah sukses memperluas kekuasaan Islam sampai ke Afrika Utara, Asia Tengah, dan sebagian Eropa. Tetapi, di sisi lain, transisi dari sistem syura ke monarki turun-temurun juga menyebabkan banyak konflik dan perpecahan di antara umat Islam. Walaupun begitu, pemerintahan Muawiyah tetap dianggap sebagai awal mula terbentuknya sistem administrasi dan pemerintahan Islam yang lebih teratur serta memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan peradaban Islam di masa mendatang.¹⁰

Transformasi Menuju Monarki Herediter

Pengubahannya yang paling besar adalah penunjukan Yazid bin Muawiyah sebagai pengganti kekuasaannya. Hal tersebut merupakan awal dari berlakunya sistem monarki turun temurun, dan berakhirnya sistem syura dalam pemerintahan islam. Pada sistem monarki hereditas, otoritas diteruskan melalui garis darah dari keluarga bangsawan. Sistem ini berbeda dari sistem sebelumnya, di mana terdapat konsensus dalam penunjukan pemimpin. Muawiyah

⁹ Ahmad Nur Fuad, "Kepemimpinan Politik Yazid Bin Muawiyah 680-683 M" 2, no. November (2025).

¹⁰ Fathiyah Husna, Rona Sifaun Nada, and Yuli Setyawati, "Sejarah Peradaban Islam Masa Dinasti Umayyah (661-750 M)" 5, no. 2 (2026).

menggunakan argumen bahwa penggunaan sistem ini penting agar menjamin kestabilan politik setelah adanya perang yang telah terjadi dalam masyarakat umat Islam.

Pengangkatan Muawiyah juga menyebabkan perpindahan ibukota dari Madinah ke Damaskus. Perpindahan ibukota tersebut melambangkan pergeseran orientasi politik Islam dari sistem yang sederhana dengan dasar masyarakat menjadi sistem imperium yang lebih luas dan terpusat. Kota Damaskus dipilih sebagai tempat pemerintahan karena adanya lokasinya yang strategis dan juga menjadi basis kekuasaan bagi Muawiyah ketika bertindak sebagai gubernur dari wilayah Syam. Pemerintahan Dinasti Umayyah mengembangkan suatu sistem administrasi pemerintahan yang lebih modern dari kota ini dengan menerapkan suatu bentuk birokrasi Bizantium dan Persia.¹¹

Perubahan ini menjadikan pemerintahan dalam Islam mengalami perubahan karakter. Sebelumnya, ketika zaman Khulafaur Rasyidin, khalifah ditafsirkan sebagai seorang pemimpin yang terpilih oleh kesepakatan bersama umat. Namun di era Umayyah, khalifah memiliki sifat sebagai raja dan kekuasaannya dapat diteruskan oleh anggota keluarganya.

Beberapa faktor yang mendorong perubahan ini antara lain:

a. Faktor Politik

Pertikaian di kalangan umat Islam setelah perang antar kelompok membuat pentingnya adanya pemerintahan yang kokoh dan teratur. Muawiyah menyadari bahwa cara pewarisan kekuasaan bisa menghentikan perebutan kekuasaan yang mungkin akan menyebabkan perang lagi.

b. Faktor Keamanan

Wilayah kekuasaan Islam di zaman Umayyah sangat besar, jadi diperlukan sistem pemerintahan yang lebih terpusat dan stabil. Sistem kerajaan dianggap bisa menjaga keamanan daerah dan memperkuat penguasaan dari pemerintahan pusat.

c. Pengaruh Sistem Kerajaan Luar

Muawiyah banyak terpengaruh oleh cara pemerintahan Bizantium dan Persia yang memakai sistem keturunan dalam kerajaan. Pengaruh ini terlihat di dalam cara administrasi, birokrasi, dan struktur kekuasaan Dinasti Umayyah.

¹¹ Journal Of, Samudra Social, and Politik Islam Klasik, "Journal Of Samudra Social Studies Research," n.d., 124-39.

Reaksi terhadap Sistem Monarki Herediter

Berdasarkan beberapa pandangan, penyesuaian sistem pemerintahan pada umat Islam mendapat reaksi bermacam-macam dari masyarakatnya. Beberapa kelompok setuju dengan sistem tersebut karena dipercaya bahwa sistem tersebut mampu mempertahankan stabilitas politik dan juga keamanan negara. Akan tetapi, tidak sedikit pula yang mengingkari atas dasar bahwa hal tersebut bertentangan dengan ajaran agama Islam pada zaman Khulafaur Rasyidin. Yang paling keras berprotes adalah para pendukung Ali bin Abi Talib yang kemudian disebut sebagai Syiah. Menurut mereka, kepemimpinan umat islam harus ada pada keluarga Ali dan Fatimah. Sementara itu, beberapa golongan Khawatir juga menentang sistem monarki karena mereka percaya bahwa pemimpin harus dipilih berdasarkan nilai-nilai dan kepercayaannya, dan bukan karena darah atau pewarisan.

Kedaulatan yang ditolak oleh Yazid bin Muawiyah juga menjadi sumber masalah besar, termasuk insiden di Karbala yang mengakibatkan kematian Husain bin Ali. Insiden tersebut merupakan salah satu tragedi terbesar dalam sejarah Islam dan makin memperburuk politik umat islam.

Dampak Trasformasi Sistem Pemerintahan

Pergeseran sistem pemerintahan dari prinsip syura menuju monarki herediter memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap trajektori politik Islam secara keseluruhan.

Pertama, dari aspek sentralisasi kekuasaan, otoritas khalifah mengalami konsolidasi yang masif melalui pengendalian terpusat atas seluruh wilayah kekuasaan Islam. Struktur birokrasi dan administrasi negara dikembangkan secara lebih sistematis dan terorganisir, menandai lahirnya aparatur pemerintahan yang lebih kompleks dibandingkan era sebelumnya.

Kedua, dalam hal pembentukan dinasti politik, Bani Umayyah merupakan presedens pertama dalam peradaban Islam yang melembagakan sistem suksesi herediter secara formal. Model ini kemudian diadopsi dan direplikasi oleh dinasti-dinasti berikutnya, termasuk Abbasiyah, Fatimiyah, dan berbagai entitas politik Islam lainnya, sehingga membentuk paradigma baru dalam tata kelola kekuasaan Islam.

Ketiga, transformasi sistem pemerintahan ini secara inheren melahirkan fragmentasi politik di tubuh umat Islam. Perubahan yang dianggap menyimpang dari nilai-nilai egalitarianisme Islam memicu kemunculan kelompok-kelompok oposisi yang menentang legitimasi kekuasaan Umayyah, sehingga mewariskan polarisasi politik yang berlangsung hingga generasi-generasi berikutnya.

Keempat, pada dimensi pembaruan administrasi negara, era Umayyah menandai modernisasi struktural dalam pengelolaan pemerintahan Islam yang meletakkan fondasi institusional bagi peradaban Islam selanjutnya. Dinasti Umayyah telah berhasil dalam menciptakan sistem administrasi negara yang lebih modern daripada masa-masa sebelumnya, di antaranya adalah perpajakan dan militer.¹²

CONCLUSION

Penelitian menyimpulkan bahwa Transformasi sistem pemerintahan Islam dari khalifah yang dipilih melalui syura menuju monarki turun-temurun terjadi pada era Dinasti Umayyah. Ini merupakan perubahan besar dalam sejarah politik Islam. Perubahan ini terjadi karena kondisi politik yang tidak stabil setelah wafatnya Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Kematian mereka memicu konflik internal di kalangan umat Islam. Munculnya Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai pendiri Dinasti Umayyah menandai lahirnya sistem pemerintahan baru. Sistem ini lebih terpusat dan diwariskan secara turun-temurun.

Pada zaman Khulafaur Rasyidin, pemerintahan Islam dibentuk berdasarkan musyawarah, baiat, dan kesepakatan rakyat. Namun, cara ini dianggap tidak cukup kuat untuk menjaga kestabilan politik di tengah wilayah kekuasaan Islam yang sangat luas dan meningkatnya persaingan memperebutkan kekuasaan. Karena itu, Muawiyah mengambil keputusan untuk menerapkan sistem pemerintahan monarki turun-temurun dengan menunjuk putranya, Yazid bin Muawiyah, sebagai penggantinya. Keputusan ini menjadi permulaan perubahan besar dalam sistem politik Islam, dari model khilafah yang berdasarkan musyawarah menjadi kerajaan yang diwariskan turun-temurun.

Transformasi besar terjadi pada perkembangan peradaban Islam. Dinasti Umayyah membuat pemerintahan lebih terorganisir. Mereka memperkuat birokrasi, meningkatkan kekuatan militer, dan memperluas wilayah Islam ke Afrika Utara, Andalusia, dan Asia Tengah. Pemerintahan menjadi lebih modern dengan sistem administrasi yang lebih baik. Kekuasaan terpusat dan bahasa Arab digunakan sebagai bahasa resmi. Semua perubahan ini berdampak besar pada kemajuan peradaban Islam. Namun demikian, perubahan menuju monarki hereditas juga memicu berbagai kritik dan konflik politik. Banyak kelompok merasa sistem tersebut bertentangan dengan prinsip syura dan nilai kesetaraan dalam Islam. Konflik legitimasi kekuasaan yang muncul pada masa Umayyah

¹² Aziz Ma, Heri Purwanto, and Rikky Wisnu Nugraha, "Tinjauan Literatur: Dampak Transformasi Digital Terhadap Pengambilan Keputusan Di Lembaga Pemerintahan," 2025, 816–25, <https://doi.org/10.33364/algorithm/v.22-2.3091>.

kemudian melahirkan berbagai gerakan oposisi seperti Syiah dan Khawarij, serta memengaruhi dinamika politik Islam pada masa-masa berikutnya.

Dengan demikian, perubahan sistem pemerintahan Islam pada masa Umayyah membuktikan bahwa politik Islam berkembang secara dinamis. Kondisi sosial, politik, dan kebutuhan administrasi negara sangat mempengaruhi perkembangan ini. Perubahan yang terjadi dalam sistem pemerintahan dari syura kepada monarki hereditas adalah salah satu titik penting dalam sejarah Islam. Dan tidak hanya mempengaruhi kekuasaan dari dinasti Umayyah saja, perubahan ini pun membentuk pola kekuasaan bagi dinasti-dinasti Islam yang lainnya yang akan terjadi nanti.

REFERENCES

- Adib, M. Afiqu. "Memahami Pusat-Pusat Peradaban Islam Masa." 2, no. 2 (2024).
- Akbar, A., J. M. Lubis, D. Sumitro, L. Hambali, and D. Tobing. "Sejarah Perkembangan Hukum Islam Periode Khulafaur Rasyidin." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2024): 4458–4467. <https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.13068>
- Ardika, Mochammad, and Akbar Bestari. "Dinamika Kekhalifahan Islam Bani Umayyah di Masa Pemerintahan Muawiyah Bin Abi Sufyan (661–680 M): Pengaruh Politik, Sosial dan Budaya." 1 (2024).
- Fuad, Ahmad Nur. "Kepemimpinan Politik Yazid Bin Muawiyah 680–683 M." 2, no. November (2025).
- Fuad Masykur, and Otong Suhendar. "Sistem Pemerintahan dan Implementasi Hukum Islam pada Masa Khulafa' Ar-Rasyidin (11–40 H/632–660 M)." *Al-Fikrah* 5, no. 1 (2025): 59–72.
- Hidayat, Rahmat, Daud Rasyid, Riska Ramdani, Rambang Basari, Retna Dwi Estuningtyas, Universitas Ibnu, and Chaldun Jakarta. "Peristiwa Fitnah Kubro: Sejarah Dakwah yang Harus." 5, no. 1 (2025): 8–16.
- Husna, Fathiyah, Rona Sifaun Nada, and Yuli Setyawati. "Sejarah Peradaban Islam Masa Dinasti Umayyah (661–750 M)." 5, no. 2 (2026).
- Ma, Aziz, Heri Purwanto, and Rikky Wisnu Nugraha. "Tinjauan Literatur: Dampak Transformasi Digital Terhadap Pengambilan Keputusan di Lembaga Pemerintahan." (2025): 816–825. <https://doi.org/10.33364/algoritma/v.22-2.3091>
- Masykur, Fuad, and Otong Suhendar. "Sistem Pemerintahan dan Implementasi Hukum Islam pada Masa Khulafa' Ar-Rasyidin (11–40 H/632–660 M)." *Al-Fikrah* 5, no. 1 (2025): 59–72.

- Pemerintahan, Sistem, Pada Masa, and Khulafaur Rasyidin. "Transformasi Manageria Transformasi Manageria." 4, no. 1 (2024): 30–41.
- Rahayu, Fitri, and Abi Thalib. "Transformasi Politik Pasca Khalifahan: Studi Atas Peran Muawiyah Ibn Abi Sofyan Dalam Pembentukan Dinasti." 8, no. 1 (2025): 1–10.
- Rahmadhani, Febri. "Al-Fitnah Al-Kubra Roots Sectarianism in Islam." *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman* 22, no. 1 (2024): 77–85. <https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v22i1.720>
- Wati, Lina, Rika Wulandari, Septia Shylviana, Rapida Idami, Sirojul Fuadi, STKIP Al, and Maksum Langkat. "Dinasti Umayyah (661–750 M): Peninggalan Sejarah dan Pengaruhnya dalam Perkembangan Islam." 2 (2025).
- "Journal of Samudra Social Studies Research." *Journal of Samudra Social Studies Research*, n.d., 124–39.
- "Sejarah Perkembangan Hukum Islam Periode Khulafaur Rasyidin." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2024): 4458–4467.
- "Sentralisasi Administrasi Keuangan Muawiyah bin Abi Sufyan: Inspirasi Untuk Manajemen Fiskal Modern." Artikel jurnal, 2025.